



# **RENCANA KERJA (RENJA) 2021**

## **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **KOTA SINGKAWANG**



**TAHUN ANGGARAN 2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke Empat dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018–2022. Renja PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun–tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2018-2022 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) PD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang dan program-program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah



- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
  - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - 13) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  - 14) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 17) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 894);

- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023;
- 19) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
- 20) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
- 21) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);
- 22) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
- 23) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.
- 24) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 6).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2021;

- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Laporan Kinerja (LK);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

3.3. Program dan Kegiatan

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Renstra Diskominfo Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Kominfo Kota Singkawang Tahun 2019 dan realisasi Renja Tahun Berjalan sampai dengan Bulan Februari 2020 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra SKPD.

##### **2.2.1. Faktor- Faktor Penyebab**

###### **a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target**

Secara umum yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Di samping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

###### **b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target**

Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
3. Ketercapaian sasaran strategis perspektif *stakeholder* sangat tergantung dari



dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga terkait lainnya.

### **2.2.2. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dikarenakan terdapat beberapa program pada tahun akhir 2020 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dikarenakan anggaran lebih terfokus pada penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2018 - 2022. Dengan tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2018 – 2022 sesuai yang direncanakan di tahun pertama pelaksanaan mengakibatkan penambahan target pada penyesuaian target capaian pada Renstra 2018 - 2022.

### **2.2.3. Kebijakan yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab**

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2020 dan Renstra 2018 – 2022.
2. Efisiensi alokasi belanja.
3. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**  
**Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
<b>2.10.01.</b>	<b>Dinas Komunikasi Dan Informatika</b>						
<b>2.</b>	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>						
<b>2.10.</b>	<b>Komunikasi Dan Informatika</b>						
<b>2.10.2.10.01.001.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>500%</b>	<b>195,85%</b>	<b>100%</b>	<b>32,07%</b>	<b>32,07%</b>
2.10.2.10.01.001.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Jenis layanan administrasi perkantoran	500%	200%	100%	29%	29%

2.10.2.10.01.001.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500%	200%	100%	25%	25%
2.10.2.10.01.001.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase penyediaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	500%	150%	100%	0%	0%
2.10.2.10.01.001.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	500%	200%	100%	50%	50%
2.10.2.10.01.001.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	500%	200%	100%	25%	25%
2.10.2.10.01.001.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500%	200%	100%	25%	25%
2.10.2.10.01.001.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	500%	200%	100%	50%	50%
2.10.2.10.01.001.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	500%	196%	100%	87%	87%
2.10.2.10.01.001.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500%	200%	100%	25%	25%
2.10.2.10.01.001.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	500%	200%	100%	25%	25%

2.10.2.10.01.001.018.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	500%	200%	100%	28%	28%
2.10.2.10.01.001.019.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan	500%	200%	100%	25%	25%
2.10.2.10.01.001.020.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	500%	200%	100%	23%	23%
<b>2.10.2.10.01.002.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>500%</b>	<b>200%</b>	<b>100%</b>	<b>19,17%</b>	<b>19,17%</b>
2.10.2.10.01.002.013.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor	500%	200%	100%	0%	0%
2.10.2.10.01.002.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500%	200%	100%	28%	28%
2.10.2.10.01.002.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	500%	100%	100%	41%	41%
<b>2.10.2.10.01.003.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>300%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2.10.2.10.01.003.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Pengadaan pakaian dinas beserta	300%	100%	100%	0%	0%

		perlengkapannya					
<b>2.10.2.10.01.006.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>15 dok</b>	<b>6 dok</b>	<b>3 dok</b>	<b>2 dok</b>	<b>100,0%</b>
2.10.2.10.01.006.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%
2.10.2.10.01.006.004.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%
2.10.2.10.01.006.006.	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	0	0%
<b>2.10.2.10.01.007.</b>	<b>Program Penguatan Transparansi Publik</b>	<b>Persentase transparansi publik</b>	<b>5 keg</b>	<b>2 keg</b>	<b>1 keg</b>	<b>0 keg</b>	<b>0%</b>
2.10.2.10.01.007.001.	Expo Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah	5 keg	2 keg	1 keg	0 keg	0%
<b>2.10.2.10.01.015.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase peningkatan komunikasi, informasi dan media massa di Kota Singkawang</b>	<b>500%</b>	<b>200%</b>	<b>100%</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>
2.10.2.10.01.015.003.	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Jumlah anggota KIM yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	240 peserta	60 peserta	55 peserta	0%	0%



2.10.2.10.01.015.007.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Perwako yang dikeluarkan	5 perwako	2 perwako	1 perwako	0%	0%
2.10.2.10.01.015.012.	Pengelolaan konten yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi publik	Jumlah Konten yang tersedia dalam rangka Pelayanan Informasi Publik	485 konten	110 konten	100 konten	52 konten	52%
<b>2.10.2.10.01.017.</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase Peningkatan kualitas pelayanan di bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>710 peserta</b>	<b>410 peserta</b>	<b>100 peserta</b>	<b>0 peserta</b>	<b>0%</b>
2.10.2.10.01.017.001.	Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi	Jumlah SDM peserta pelatihan	710 peserta	410 peserta	100 peserta	0 peserta	0%
<b>2.10.2.10.01.018.</b>	<b>Program Kerjasama informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase Peningkatan kerjasama Informasi dan Media Massa</b>	<b>500%</b>	<b>200%</b>	<b>100%</b>	<b>81,82%</b>	<b>81,82%</b>
2.10.2.10.01.018.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah kegiatan diseminasi melalui FK Metra	5 keg	2 keg	1 keg	0%	0%
2.10.2.10.01.018.002.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	11.600 berita	4.400 berita	2.400 berita	33,33%	33,33%
2.10.2.10.01.018.003.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan internet sehat	5.025 peserta	1.425 peserta	1.100 peserta	0%	0%
2.10.2.10.01.018.004.	Pengelolaan Media	Jumlah pelayanan informasi	60 video dan info grafis, 135	60 Video dan Info	30 dokumen	66,67%	66,67%

	Komunikasi Publik	publik	dokumen	Grafis			
2.10.2.10.01.018.005.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	29 OPD	29 OPD	29 OPD	0%	0%
2.10.2.10.01.018.006.	Konferensi Pers	Jumlah pelaksanaan konferensi pers	60 kegiatan	16 kegiatan	12 kegiatan	50%	50%
2.10.2.10.01.018.007.	Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Jumlah kegiatan pengelolaan LPPL	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0%	0%
<b>2.10.2.10.01.065.</b>	<b>Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov</b>	<b>Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi e-government</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>
2.10.2.10.01.065.003.	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	Jumlah server yang dipelihara	85 server	24 server	12 server	12 server	100%
2.10.2.10.01.065.007.	Pembangunan Jaringan CCTV	Jumlah CCTV yang terpasang	50 CCTV	20 CCTV	10 CCTV	0%	0%
2.10.2.10.01.065.008.	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	Jumlah akses Jaringan Internet yang terkoneksi	29 OPD, 26 kelurahan	29 OPD, 26 kelurahan	29 OPD, 26 kelurahan	25%	25%
2.10.2.10.01.065.018.	Penyusunan Masterplan TIK	Jumlah Dokumen Kajian Masterplan TIK	4 dok	1 dokumen	1 dokumen	0%	0%
2.10.2.10.01.065.022.	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik	Jumlah Aplikasi Yang terealisasi	5 aplikasi	2 aplikasi	1 aplikasi	0%	0%
2.10.2.10.01.065.023.	Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang diterapkan	5 aplikasi	2 aplikasi	1 aplikasi	50%	50%

2.10.2.10.01.065.024	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah aplikasi yang berjalan	5 aplikasi	0	2 aplikasi	0%	0%
	Pengelolaan Control Room	Jumlah tenaga operator, teknisi, maintenance peralatan Control Room	14 orang	0	4 orang	25%	25%
2.10.2.10.01.067.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Persandian</b>	<b>Persentase pengamanan berita sandi</b>	<b>35%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2.14.2.10.01.067.001	Optimalisasi Fungsi Persandian dan Pengamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	35%	0%	25%	0%	0%
2.14.2.10.01.015.	<b>Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah</b>	<b>Persentase cakupan data statistik Kota Singkawang</b>	<b>400%</b>	<b>200%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2.14.2.10.01.015.001	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	400%	100,42%	100%	0%	0%
2.14.2.10.01.015.002	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Buku Kota Singkawang dalam angka, PDRB, statistik sektoral	5 buku	2 buku	3 buku	0%	0%
4.05.2.10.01.051.	<b>Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi</b>	<b>Persentase penilaian bobot jabatan dalam penetapan standar gaji</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

		<b>PNS</b>					
4.05.2.10.01.051.012	Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	5 dok	1 dok	1 dok	0%	0%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2018 - 2022, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang memiliki 1 ( satu ) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dalam hal kinerja pelayanan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Layanan SPBE	-	-	-	Level 2	Level 2	Level 2	-	-	Level 2	Level 2	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan



yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi yang masih belum menyentuh secara menyeluruh pada lapisan masyarakat utamanya bagi yang ada di wilayah perdesaan.
2. Masih kurangnya sumberdaya manusia pada bidang teknologi informasi yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, lingkup OPD, dan pada lingkup masyarakat.
3. Belum optimalnya tingkat keterbukaan informasi public secara menyeluruh pada wilayah Kota Singkawang.
4. Pengelolaan sarana Komunikasi dan informasi baik berupa televisi maupun radio masih sangat terbatas baik dari jangkauan siaran maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kota Singkawang. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2018 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi secara bertahap dan menyeluruh.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga mampu untuk merancang, melakukan evaluasi metode, dan memanfaatkan informasi dan teknologi beserta pendukungnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
3. Meningkatkan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan system teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima pemerintah Kota Singkawang kepada masyarakat.
4. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasian *e-Government* yang didasarkan kepada penguatan koordinasi secara kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan penyediaan aplikasi beserta perencanaannya yang dilakukan dengan penilaian secara berkala.
5. Pemanfaatan jaringan Internet untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.3.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Singkawang	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.384.485.050,32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Singkawang	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.384.485.050,32	
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	52.000.000,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	52.000.000,00	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Singkawang	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Kominfo	1 dok	6.000.000,00	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Singkawang	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Kominfo	1 dok	6.000.000,00	

2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Singkawang	Jumlah dokumen Perjankin Kominfo	1 dok	6.000.000,00	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Singkawang	Jumlah dokumen Perjankin Kominfo	1 dok	6.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singkawang	Jumlah dokumen evaluasi Renstra, Renja, Perjankin dan Kedisiplinan Kominfo	4 dok	40.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singkawang	Jumlah dokumen evaluasi Renstra, Renja, Perjankin dan Kedisiplinan Kominfo	4 dok	40.000.000,00	
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3.230.589.290,32</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3.230.589.290,32</b>	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	3.212.589.290,32	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	3.212.589.290,32	
5	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Singkawang	Jumlah dokumen RKA/DPA	2 dok	6.000.000,00	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Singkawang	Jumlah dokumen RKA/DPA	2 dok	6.000.000,00	
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Singkawang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	6.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Singkawang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	6.000.000,00	
7	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Singkawang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	6.000.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Singkawang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	6.000.000,00	
<b>C</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>5.052.695.760,00</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>5.052.695.760,00</b>	
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Singkawang	Persentase Jenis layanan administrasi perkantoran	100%	2.298.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Singkawang	Persentase Jenis layanan administrasi perkantoran	100%	2.298.000,00	
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	340.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	340.000.000,00	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Singkawang	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan kendaraan	2 unit mobil	8.224.920,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Singkawang	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan kendaraan	2 unit mobil	8.224.920,00	

	Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		dinas/operasional			Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		dinas/operasional			
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	15.789.900,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	15.789.900,00	
12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Singkawang	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	81.431.760,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Singkawang	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	81.431.760,00	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Singkawang	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	65.648.400,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Singkawang	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	65.648.400,00	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Singkawang	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	8.224.920,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Singkawang	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	8.224.920,00	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Singkawang	Persentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	799.800.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Singkawang	Persentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	799.800.000,00	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Singkawang	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	6.739.200,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Singkawang	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	6.739.200,00	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Singkawang	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	51.830.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Singkawang	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	51.830.000,00	
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Singkawang	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	799.118.280,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Singkawang	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	799.118.280,00	
19	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Singkawang	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	166.392.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Singkawang	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	166.392.000,00	
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Singkawang	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 mobil, 4 unit motor	388.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Singkawang	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 mobil, 4 unit motor	388.000.000,00	
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Singkawang	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	2.200.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Singkawang	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	2.200.000.000,00	

	Kantor		Lingkungan Kantor			Kantor		Lingkungan Kantor			
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Singkawang	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	69.457.500,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Singkawang	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	69.457.500,00	
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Singkawang	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	49.740.880,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Singkawang	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	49.740.880,00	
D	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Singkawang	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100%	49.200.000,00	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Singkawang	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100%	49.200.000,00	
24	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Operasional	Singkawang	Persentase Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	49.200.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Operasional	Singkawang	Persentase Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	49.200.000,00	
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Singkawang	Persentase pelaksanaan program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	1.156.432.632,00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Singkawang	Persentase pelaksanaan program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	1.156.432.632,00	
E	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah	100%	1.156.432.632,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah	100%	1.156.432.632,00	
25	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah Perwako yang dikeluarkan	1 perwako	26.555.130,00	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah Perwako yang dikeluarkan	1 perwako	26.555.130,00	
26	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	5 Media Komunikas i Publik	36.335.670,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	5 Media Komunikas i Publik	36.335.670,00	



27	Layanan Hubungan Media	Singkawang	Jumlah informasi/berita yang dipublikasikan	800 berita	574.820.925,00	Layanan Hubungan Media	Singkawang	Jumlah informasi/berita yang dipublikasikan	800 berita	574.820.925,00	
28	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah Konten yang tersedia dalam rangka Pelayanan Informasi Publik	100 konten	141.704.640,00	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah Konten yang tersedia dalam rangka Pelayanan Informasi Publik	100 konten	141.704.640,00	
29	Pelayanan Informasi Publik	Singkawang	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan melalui website PPID	45 Dokumen	36.335.670,00	Pelayanan Informasi Publik	Singkawang	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan melalui website PPID	45 Dokumen	36.335.670,00	
30	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	29 OPD	19.840.850,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	29 OPD	19.840.850,00	
31	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Singkawang	Jumlah peserta kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan diseminasi informasi melalui komunitas	1.300 orang	320.839.747,00	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Singkawang	Jumlah peserta kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan diseminasi informasi melalui komunitas	1.300 orang	320.839.747,00	
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Singkawang	Persentase dokumen perencanaan , laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	6.545.669.166,00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Singkawang	Persentase dokumen perencanaan , laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	6.545.669.166,00	
F	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SKPD	Singkawang	Persentase penerapan aplikasi E-Government	100%	195.640.045,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SKPD	Singkawang	Persentase penerapan aplikasi E-Government	100%	195.640.045,00	

32	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Singkawang	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	76 sistem, 12 server	195.640.045	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Singkawang	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	76 sistem, 12 server	195.640.045	
G	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Jumlah domain dan sub domain Pemkot Singkawang yang terbangun dan jumlah ruang server yang dirawat</b>	<b>100%</b>	<b>6.350.029.121,00</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Jumlah domain dan sub domain Pemkot Singkawang yang terbangun dan jumlah ruang server yang dirawat</b>	<b>100%</b>	<b>6.350.029.121,00</b>	
34	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Singkawang		40%	623.688.860,00	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Singkawang		40%	623.688.860,00	
35	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Singkawang	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 cctv, 24 OPD, 5 Kec dan 26 Kel, 1 menara telekomuni kasi	4.500.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Singkawang	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 cctv, 24 OPD, 5 Kec dan 26 Kel, 1 menara telekomuni kasi	4.500.000.000,00	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Singkawang	Persentase Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	50%	129.919.062,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Singkawang	Persentase Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	50%	129.919.062,00	
37	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Singkawang		3 aplikasi, 5 orang	172.000.000,00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Singkawang		3 aplikasi, 5 orang	172.000.000,00	
38	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Singkawang	Jumlah CCTV yang terpasang, Jumlah Akses Jaringan Internet yang	50%	2.000.000.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Singkawang	Jumlah CCTV yang terpasang, Jumlah Akses Jaringan Internet yang	50%	2.000.000.000,00	

	Informasi dan Komunikasi Pemerintah		terkoneksi dan Jumlah Menara Telekomunikasi yang di bangun			Informasi dan Komunikasi Pemerintah		terkoneksi dan Jumlah Menara Telekomunikasi yang di bangun			
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Persentase Perangkat daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan Website Pemerintah Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>880.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Persentase Perangkat daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan Website Pemerintah Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>880.000.000,00</b>	
H	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>880.000.000,00</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Singkawang</b>	<b>Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>880.000.000,00</b>	
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Singkawang	Jumlah laporan/publikasi database statistik sektoral Kota Singkawang (tahun n-1)	1 buku	300.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Singkawang	Jumlah laporan/publikasi database statistik sektoral Kota Singkawang (tahun n-1)	1 buku	300.000.000,00	
40	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Singkawang		2 kali	250.000.000,00	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Singkawang		2 kali	250.000.000,00	
41	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Singkawang	Jumlah Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan statistik sektoral Kota Singkawang	1 buku	150.000.000,00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Singkawang	Jumlah Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan statistik sektoral Kota Singkawang	1 buku	150.000.000,00	
42	Pengembangan Infrastruktur	Singkawang	Tersedianya infrastruktur pendukung	1 Paket	180.000.000,00	Pengembangan Infrastruktur	Singkawang	Tersedianya infrastruktur pendukung	1 Paket	180.000.000,00	

			penyelenggaraan statistik sektoral					penyelenggaraan statistik sektoral			
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi	82,7%	162.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi	82,7%	300.000.000,00	
I	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	162.000.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	162.000.000,00	
43	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Jumlah Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Kota	1 Dok	100.000.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Jumlah Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Kota	1 Dok	100.000.000,00	
44	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Singkawang	Jumlah Kegiatan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Kegiatan	62.000.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Singkawang	Jumlah Kegiatan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Kegiatan	62.000.000,00	

2.5 PENELAAHAN UŞULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

**Tabel 2.4.**  
**Uşulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Tidak Ada Uşulan					



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

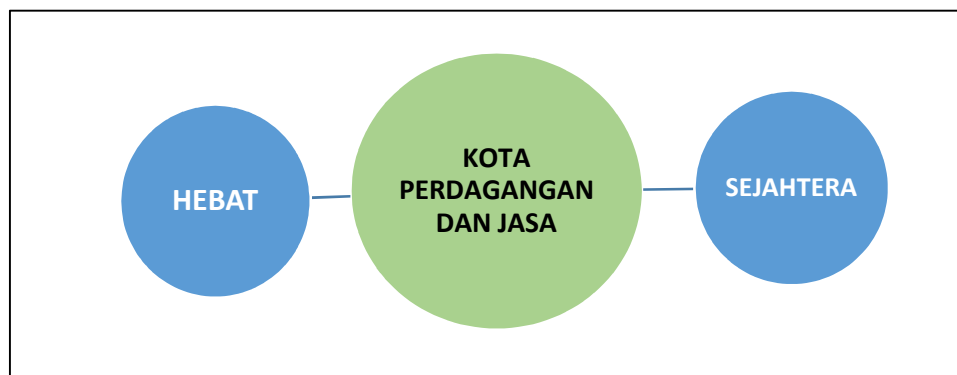
#### 3.1.1 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Walikota Singkawang dan Wakil Walikota Singkawang Periode Tahun 2018 - 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah :

#### **"Singkawang HEBAT 2022"**

Kata **"HEBAT"** yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut : **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya; **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri; **B**ersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan; **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan; **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Visi tersebut memiliki elemen utama pembangunan untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan dan jasa yaitu **hebat** dan **sejahtera**.



Visi tersebut mengandung maksud bahwa Singkawang sebagai kota yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam pedagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hebat mengandung arti bahwa masyarakat Kota Singkawang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kota Singkawang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya.

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

c. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

d. Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan.

Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata.

Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini

mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota.

Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata.

Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat, Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang.

Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;
- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi;
- 5) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat Dan Cerdas;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah Dan Berkesinambungan;
- 7) Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata.

Dari Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, Diskominfo merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, maka dalam merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2018-2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Misi ke empat yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada

Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi, tujuannya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi serta sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

### **3.1.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022**

Telaah terhadap RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Singkawang yang terdiri dari 15 tujuan, 25 sasaran dan 45 indikator kinerja sasaran yang terukur setiap tahunnya dalam kerangka pencapaian visi dan misi.
- 2) Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 pada RPJMD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Singkawang dan rumusan program pembangunan sebanyak 93 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Penjabaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari uraian tersebut di atas, Diskominfo Kota Singkawang memiliki tugas yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Singkawang. Peran strategis Diskominfo untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kota Singkawang terutama dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus mempedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

### **3.1.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019 DAN RENSTRA DISKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 – 2024**

#### **3.1.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015— 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden

dan Wakil Presiden periode 2015–2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015–2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015–2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut.

Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1 Rumusan 2.2 Rumusan Misi 27 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019 dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

### **3.1.3.2 TELAAHAN RENSTRA DISKOMINFO PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 - 2023**

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tahun 2005-2025, maka visi pembangunan daerah tahun 2018–2023 yang akan direalisasikan adalah:

#### ***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”***

Visi tersebut akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Di antara misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

#### **Tugas dan Fungsi Diskominfo**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 71 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;



- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.1.3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT RW. Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- 1) Kawasan Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa;
- 2) Kawasan Permukiman;
- 3) Kawasan Pendidikan;
- 4) Kawasan Industri;
- 5) Kawasan Olahraga;
- 6) Kawasan Wisata/Rekreasi;
- 7) Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- 8) Kawasan Pemakaman Umum;
- 9) Kawasan Khusus;
- 10) Kawasan Cagar Budaya;
- 11) Kawasan Pertanian;
- 12) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara;
- 13) Kawasan Budi Daya Sumber Daya Alam;
- 14) Kawasan Strategis;
- 15) Kawasan Hutan Lindung;
- 16) Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 17) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RT RW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :



- 1) Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RT RW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Singkawang yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- 1) Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RT RW;
- 2) Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 3) Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
- 4) Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

Adapun tujuan utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah **Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi**. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut.

**Tujuan : Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi.**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran :

**Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi**, dengan indikator sasaran :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 2) Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TIK dengan baik;
- 3) Persentase Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- 4) Persentase tertanganinya pengaduan masyarakat;
- 5) Tercapainya diseminasi informasi ke masyarakat;

- 6) Terlaksananya penyebaran informasi daerah;
- 7) Terpenuhinya infrastruktur TIK di Kota Singkawang;
- 8) Terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintah.



3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021  
dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Singkawang	100%	8.384.485.050,32	APBD Kota		100%	7.557.254.752,56
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Singkawang	100%	52.000.000,00	APBD Kota		100%	62.400.000,00

		<b>Perangkat Daerah</b>							
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Kominfo	Singkawang	1 dok	6.000.000,00	APBD Kota		1 dok	7.200.000,00
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Perjankin Kominfo	Singkawang	1 dok	6.000.000,00	APBD Kota		1 dok	7.200.000,00
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renstra, Renja, Perjankin dan Kedisiplinan Kominfo	Singkawang	4 dok	40.000.000,00	APBD Kota		4 dok	48.000.000,00
<b>X-XX-01-2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi keuangan</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>3.230.589.290,32</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>3.758.363.277,56</b>
X-XX-01-2.02-01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Singkawang	100%	3.212.589.290,32	APBD Kota		100%	3.736.763.277,56
X-XX-01-2.02-04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah dokumen RKA/DPA	Singkawang	2 dok	6.000.000,00	APBD Kota		2 dok	7.200.000,00

	Keuangan								
X-XX-01-2.02-06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Singkawang	1 dok	6.000.000,00	APBD Kota		1 dok	7.200.000,00
X-XX-01-2.02-09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Singkawang	1 dok	6.000.000,00	APBD Kota		1 dok	7.200.000,00
<b>X-XX-01-2.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi umum</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>5.052.695.760,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>3.677.451.475,00</b>
X-XX-01-2.03-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jenis layanan administrasi perkantoran	Singkawang	100%	2.298.000,00	APBD Kota		100%	2.757.600,00
X-XX-01-2.03-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Singkawang	100%	340.000.000,00	APBD Kota		100%	408.000.000,00
X-XX-01-2.03-06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Singkawang	2 unit mobil	8.224.920,00	APBD Kota		3 unit mobil	9.869.904,00
X-XX-01-2.03-08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa	Singkawang	100%	15.789.900,00	APBD Kota		100%	18.947.880,00

		Kebersihan Kantor							
X-XX-01-2.03-10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	Singkawang	100%	81.431.760,00	APBD Kota		100%	97.718.112,00
X-XX-01-2.03-11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Singkawang	100%	65.648.400,00	APBD Kota		100%	78.778.080,00
X-XX-01-2.03-12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Singkawang	100%	8.224.920,00	APBD Kota		100%	9.869.904,00
X-XX-01-2.03-13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Singkawang	100%	799.800.000,00	APBD Kota		100%	959.760.000,00
X-XX-01-2.03-15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Singkawang	100%	6.739.200,00	APBD Kota		100%	8.087.040,00
X-XX-01-2.03-17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	Singkawang	100%	51.830.000,00	APBD Kota		100%	60.196.000,00

X-XX-01-2.03-18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Singkawang	100%	799.118.280,00	APBD Kota		100%	958.941.936,00
X-XX-01-2.03-07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan	Singkawang	100%	166.392.000,00	APBD Kota		100%	199.670.400,00
X-XX-01-2.03-20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Singkawang	1 mobil, 4 unit motor	388.000.000,00	APBD Kota		1 mobil, 4 unit motor	465.600.000,00
X-XX-01-2.03-28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor	Singkawang	100%	1,396,514,151,00	APBD Kota		100%	256.216.563,00
X-XX-01-2.03-33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Singkawang	100%	69.457.500,00	APBD Kota		100%	83.349.000,00
X-XX-01-2.03-34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Singkawang	100%	49.740.880,00	APBD Kota		100%	59.689.056,00

<b>X-XX-01-2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>59.040.000,00</b>
X-XX-01-2.04-02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Operasional	Persentase Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Singkawang	100%	49.200.000,00	APBD Kota		100%	59.040.000,00
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase pelaksanaan program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>1.156.432.632,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>1.276.257.053,90</b>
<b>2.16.02.2-01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>1.156.432.632,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>1.276.257.053,90</b>
2.16.02.2-01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Perwako yang dikeluarkan	Singkawang	1 perwako	26.555.130,00	APBD Kota		1 perwako	27.882.886,50
2.16.02.2-01.02	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik	Singkawang	5 Media Komunikasi Publik	36.335.670,00	APBD Kota		5 Media Komunikasi Publik	43.602.804,00



		yang dikelola							
2.16.02.2-01.03	Layanan Hubungan Media	Jumlah informasi/berita yang dipublikasikan	Singkawang	800 berita	574.820.925,00	APBD Kota		800 berita	603.561.971,00
2.16.02.2-01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang tersedia dalam rangka Pelayanan Informasi Publik	Singkawang	100 konten	141.704.640,00	APBD Kota		100 konten	148.789.872,00
2.16.02.2-01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan melalui website PPID	Singkawang	45 Dokumen	36.335.670,00	APBD Kota		45 Dokumen	43.602.804,00
2.16.02.2-01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	Singkawang	29 OPD	19.840.850,00	APBD Kota		29 OPD	23.809.020,00
2.16.02.2-01.12	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan diseminasi informasi melalui komunitas	Singkawang	1.300 orang	320.839.747,00	APBD Kota		1.300 orang	385.007.696,40
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan , laporan</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>6.545.669.166,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>7.318.594.607,00</b>

		<b>keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu</b>							
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SKPD</b>	<b>Persentase penerapan aplikasi E-Government</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>195.640.045,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>238.332.057,00</b>
2-16-03-2.01-02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	76 sistem, 12 server	195.640.045	APBD Kota		80 sistem, 13 server	238.332.057,00
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah domain dan sub domain Pemkot Singkawang</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>6.350.029.121,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>7.080.262.550,00</b>

	Kabupaten/Kota	yang terbangun dan jumlah ruang server yang dirawat							
2-16-03-2.02-02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik		Singkawang	40%	623.688.860,00	APBD Kota		45%	694.873.303,00
2-16-03-2.02-03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	10 cctv, 24 OPD, 5 Kec dan 26 Kel, 1 menara telekomunikasi	4.500.000.000,00	APBD Kota		10 cctv, 24 OPD, 5 Kec dan 26 Kel	5.000.000.000,00
2-16-03-2.02-06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Singkawang	50%	129.919.062,00	APBD Kota		50%	155.902.874,00
2-16-03-2.02-07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Singkawang	3 aplikasi, 5 orang	172.000.000,00	APBD Kota		3 aplikasi, 5 orang	1.000.000.000,00
2-16-03-2.02-10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Jumlah CCTV yang terpasang, Jumlah Akses Jaringan	Singkawang	50%	2.000.000.000,00	APBD Kota		50%	229.486.373,00

	Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Internet yang terkoneksi dan Jumlah Menara Telekomunikasi yang di bangun							
2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Perangkat daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan Website Pemerintah Kota Singkawang</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>880.000.000,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>730.000.000,00</b>
2.20.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>880.000.000,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>730.000.000,00</b>
2-20-02-2.01-01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah laporan/publikasi database statistik sektoral Kota Singkawang (tahun n-1)	Singkawang	1 buku	300.000.000,00	APBD Kota		1 buku	300.000.000,00
2-20-02-2.01-02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu	Jumlah Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan	Singkawang	2 kali	250.000.000,00	APBD Kota		2 kali	250.000.000,00

	Statistik Daerah yang Terintegrasi	statistik sektoral Kota Singkawang							
2-20-02-2.01-03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan/publikasi metadata indikator sesuai dokumen perencanaan tahunan Kota Singkawang (tahun n+1)	Singkawang	1 buku	150.000.000,00	APBD Kota		1 buku	150.000.000,00
2.20.02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya infrastruktur pendukung penyelenggaraan statistik sektoral	Singkawang	1 Paket	180.000.000,00	APBD Kota		1 Paket	30.000.000,00
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERISANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi</b>	<b>Singkawang</b>	<b>82,7%</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>162.000.000,00</b>
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Perisandian untuk Pengamanan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pengamanan</b>	<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>APBD Kota</b>		<b>100%</b>	<b>162.000.000,00</b>

	Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	informasi pemerintah daerah kabupaten/kota							
2-21-02-2.01-01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Kota	Singkawang	1 Dok	100.000.000,00	APBD Kota		1 Dok	100.000.000,00
2-21-02-2.01-03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Kegiatan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Singkawang	1 Kegiatan	62.000.000,00	APBD Kota		1 Kegiatan	62.000.000,00
TOTAL					16,325,101,000,00				17,035,106,413,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.384.485.050,32 dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 52.000.000,00
  - Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.000.000,00
  - Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.000.000,00
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.000.000,00
- Kegiatan Administrasi Keuangan  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.230.589.290,32
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.212.589.290,32
  - Sub Kegiatan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.000.000,00
  - Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.000.000,00
  - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.000.000,00
- Kegiatan Administrasi Umum  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.052.695.760,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 2.298.000,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 340.000.000,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.224.920,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.789.900,00
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 81.431.760,00
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 65.648.400,00
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.224.920,00
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 799.800.000,00
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.739.200,00
- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 51.830.000,00
- Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 799.118.280,00
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 166.392.000,00
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 388.000.000,00
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 2.200.000.000,00
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 69.457.500,00
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 49.740.880,00
- Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 49.200.000,00
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Operasional  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 49.200.000,00



**2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.156.432.632,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.156.432.632,00

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 26.555.130,00

- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 36.335.670,00

- Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 574.820.925,00

- Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 141.704.640,00

- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 36.335.670,00

- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.840.850,00

- Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 320.839.747,00

**3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.545.669.166,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SKPD  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 195.640.045,00

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 195.640.045

- Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.350.029.121,00

- Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 623.688.860,00

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.500.000.000,00

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 129.919.062,00
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 172.000.000,00
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 2.000.000.000,00

**4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 880.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 880.000.000,00
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 880.000.000,00
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 300.000.000,00
  - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 250.000.000,00
  - Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 150.000.000,00
  - Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 180.000.000,00

**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 300.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 162.000.000,00
  - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.000.000,00

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik  
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 62.000.000,00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik.

Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika harus sama dengan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Singkawang, 2020  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Singkawang

**Drt. AHYADI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631123 199003 1 003